

THE RISE OF MAOIST AFTER EIGHT YEARS OF PEACE

KEBANGKITAN MAOIST SETELAH DELAPAN TAHUN BERDAMAI

M.Adisti^{1*}, M. Agus Triyandi¹, M. Rajuali Aditya¹, N. Noviyanti¹, N. Renaldi¹

¹ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Surel: mariaadisti@student.untan.ac.id

Abstract

This paper aims to explain the indication of the rise of the Maoists in controlling the region in Nepal. Maoists are an armed group that is carrying out movements in Nepal. The movement is considered part of the terrorism movement because it has created instability in the country of Nepal and caused a number of losses to the people of Nepal. In 2005, the Maoists turned into an opposition party through an MoU that had been ratified with the hope that the Maoists would turn into groups that did not carry out armed movements as they had before. However, the movements carried out by the Maoists did not change completely, indicating that the old Maoists had revived. In the following years, there were events that indicated that the Maoists revived with a new identity from the old Maoist fragments. In this study using the Theory of Constructivism to explain the issues raised. Constructivism Theory outlines can explain how social construction can influence the development of Maoist groups in Nepal. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The data collection technique used is the study of literature from books, journals, including data from websites that support the explanation of the phenomena raised.

Keywords: Rise; Maoist; Nepal; Terrorism

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan tentang indikasi kebangkitan Maoist dalam menguasai wilayah di Nepal. Maoist merupakan kelompok bersenjata yang melakukan gerakan di Nepal. Gerakan tersebut dianggap sebagai bagian dari gerakan terorisme karena telah menciptakan ketidakstabilan di negara Nepal dan membuat sejumlah kerugian bagi masyarakat Nepal. Pada tahun 2005, Maoist berubah menjadi partai oposisi melalui MoU yang telah disahkan dengan harapan bahwa Maoist akan berubah menjadi kelompok yang tidak melakukan gerakan bersenjata sebagaimana yang pernah dilakukan sebelumnya. Namun, gerakan yang dilakukan Maoist tidak berubah sepenuhnya sehingga mengindikasikan bahwa Maoist lama bangkit kembali. Di tahun-tahun berikutnya, terdapat kejadian-kejadian yang mengindikasikan bahwa Maoist bangkit kembali dengan identitas baru dari pecahan Maoist yang lama. Dalam penelitian ini menggunakan Teori Konstruktivisme untuk menjelaskan masalah yang diangkat. Teori Konstruktivisme secara garis besar dapat menjelaskan bagaimana konstruksi sosial dapat mempengaruhi perkembangan kelompok Maoist di Nepal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan studi literatur dari buku, jurnal, termasuk data dari website yang mendukung penjelasan fenomena yang diangkat.

Kata Kunci: Kebangkitan; Maoist; Nepal; Terorisme

Diajukan: 10 Oktober 2021

Direvisi: 10 Desember 2021

Diterima: 24 Desember 2021

Sitasi: Adisti, et.al. (2021). Kebangkitan Maoist Setelah Delapan Tahun Berdamai. *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 26 (2), 85-99.

Pendahuluan

Nepal merupakan negara kecil yang terletak di benua Asia. Nepal terletak diantara negara China dan India yang mana memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar dibanding Nepal. Nepal sendiri tergolong sebagai negara miskin di dunia sehingga membutuhkan berbagai mitra dalam bekerja sama untuk berinvestasi membantu pertumbuhan ekonomi Nepal. Secara historis, Nepal lebih dekat dengan India dimana memiliki keyakinan dan budaya serta adanya hubungan diplomatik sejak adanya Perjanjian Sugauli antara kaum Monarki di Nepal dengan *British East India Company* pada tahun 1816 hingga pada zaman India modern pada tahun 1950.

Hubungan diplomatik Nepal dan China sendiri dimulai pada tahun 1955 yang bekerja sama dalam stabilitas keamanan tentang permasalahan yang timbul akibat adanya gerakan separatis di Tibet yang telah mengancam keamanan wilayah perbatasan kedua negara. Namun, pada saat ini hubungan Nepal dan kedua negara telah mengalami dinamika. Nepal lebih cenderung bekerja sama dengan China dalam berupaya untuk memperkuat stabilitas politik, kewarganegaraan dan kekuatan ekonominya. China menjadi aktor penting dalam politik luar negeri Nepal pada tahun 1950 hingga 1960an.¹

Kedekatan Nepal dengan kedua negara tersebut tentu berdampak pada kondisi dalam negeri Nepal. Sebagai negara yang baru mulai berkembang pada tahun 1960, Nepal mengalami kebingungan dalam memilih fokus perkembangan internal negara, yakni antara perekonomian dan modernisasi politik. Hal ini wajar terjadi pada Nepal karena merupakan langkah awal dalam membangun negara. Sedikit banyak pengaruh yang telah tertanam di Nepal akibat hubungan erat dengan kedua negara tersebut, terutama dalam bidang politik. Nepal merupakan negara yang menganut sistem monarki. Akibat adanya hubungan era antara Nepal dan kedua negara tersebut, maka dunia politik Nepal sedikit demi sedikit bergeser dari sistem monarki. Monarki yang dianut merupakan perwakilan dari sistem demokrasi yang berlandaskan ajaran Hindu di Nepal, tetapi sistem tersebut mengalami tantangan sehingga terjadi pergeseran.

Hubungan Nepal dengan China telah membawa pengaruh bagi pemimpin Nepal dimana sistem monarki tersebut diadopsi dari China. Pemimpin Nepal, Raja Mahendra, memosisikan China sebagai faktor penting dalam memformulasikan kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Raja Mahendra selama 1950 hingga 1960-an untuk melawan pengaruh India di Nepal. Kemudian, Raja Gyanendra secara terbuka mendukung China dalam KTT ketiga belas dari Asosiasi Asia Selatan untuk Kerja sama Regional (SAARC).² Namun, kepemimpinan Raja Gyanendra mendapati kecaman dari masyarakat Nepal yang menginginkan pergeseran dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Hal ini dikarenakan adanya perilaku raja yang sewenang-wenang dalam memimpin.

Pemberontakan yang terjadi merupakan gerakan yang diinisiasi oleh Partai Komunis Nepal (Maoist) yang lahir dari pemikiran tokoh penting di China. Kelompok ini lahir akibat adanya kedekatan antara Nepal dan China. Kelompok yang dikenal sebagai

¹Oktavian Sandiz Prasetya, "Keputusan Nepal Menjadikan Cina Sebagai Investor Utama Menggantikan India: Perkembangan Politik di Nepal" (Skripsi Strata Satu, Universitas Jember, 2017) *Repository UNEJ*

² Ibid, hlm. 28.

Maoist ini melakukan berbagai tindakan kekerasan dan pemberontakan di sebagian wilayah Nepal pada tahun 1996. Pada Juli 2001, Perdana Menteri Deuba membuat kebijakan untuk melakukan gencatan senjata yang mengharuskan Maoist untuk mematuhi agar dapat mencapai negosiasi yang bijak dalam menyelesaikan konflik. Tetapi, pembunuhan masih saja terjadi saat gencatan senjata tersebut diperlakukan.³

Kelompok Maoist yang pada awalnya terdiri dari kelompok aslinya saja akhirnya bergabung dengan partai politik di Nepal dalam rangka memulihkan demokrasi di Nepal. Berbagai gerakan pun dilakukan dalam mencapai tujuan bersama kelompok tersebut. Hingga pada akhirnya, melalui aturan yang dikeluarkan oleh kerajaan pada Februari 2005, Nepal merubah negaranya dari monarki menjadi demokrasi. Kemudian, kelompok Maoist menjadi oposisi dalam negara tersebut. Namun, masih terjadi ketegangan antara Maoist dan *Seven Alliance Party* (SPA) yang merupakan partai politik di Nepal sehingga mengharuskan adanya penandatanganan MoU yang menyepakati wilayah kekuasaan Maoist dan SPA yang keluar pada tahun 2006.

Namun, pergerakan Maoist maupun SPA tidak hanya sampai disitu. Setelah terjadinya penandatanganan kesepakatan di dalam negeri Nepal, terdapat berbagai aksi yang mengindikasikan bahwa Maoist bangkit kembali sebagai kelompok yang bertentangan dengan dasar-dasar negara. Dari pergerakan tersebutlah, maka penelitian ini akan mencoba memaparkan tentang bagaimana kondisi politik di dalam Nepal saat ini yang mengindikasikan bahwa Maoist bangkit kembali sebagai kelompok yang kontra terhadap pemerintahan. Pada penelitian ini akan digunakan Teori Konstruktivisme sebagai *framing* dalam memahami indikasi kebangkitan Maoist di Nepal.

Teori yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah konstruktivisme dalam Hubungan Internasional. Berdasarkan pemikiran dari para tokoh seperti Friedrich Kratochwill, Nicolas Onuf, Alexander Went, dan John Ruggie mengenai Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional, Konstruktivisme tersebut dapat diartikan yaitu penyatuan masyarakat atau kelompok masyarakat dilakukan melalui penyampaian gagasan yang mana berarti penyatuan kelompok masyarakat tersebut.⁴ Selain itu, untuk menyampaikan gagasan tersebut agar sampai ke masyarakat diperlukan aktor. Jadi, di sini aktor-aktor berperan sebagai penyalur gagasan atau ide kepada masyarakat dengan cara mereka melakukan interaksi kepada masyarakat di lingkungannya baik itu dari segi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Sebenarnya tidak terdapat dilatar belakangi oleh kepentingan aktor-aktor tersebut untuk mencapai tujuan tertentu.

Gagasan atau ide yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat tersebut bersifat dinamis dan menjadi variabel yang terlihat dari bagaimana cara aktor melihat target mereka.⁵ Identitas dari aktor juga mempengaruhi tindakan atau cara yang akan

³ M. Fairuz A'unillah. "Proses Pergantian Sistem Politik dan Pemerintahan di Nepal: Perubahan Sistem Pemerintahan Nepal" (Skripsi Strata Satu, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010) *Repository UMY*

⁴ Sugiarto Pramono, dan Andi Purwono. "Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional: Gagasan dan Posisi Teoritik." *SPEKTRUM*, 2010: 14.

⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

diambilnya. Pada studi kasus yang diangkat pada tulisan ini, Konstruktivisme digunakan sebagai konsep yang menjadikan gagasan sebagai terciptanya penyatuan kelompok melalui aktor-aktor gerakan Maoist yang telah menciptakan pengaruh politik yang besar bagi masyarakat Nepal.

Metode Penelitian

Pada tulisan ini, metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif pada penelitian ini merujuk pada pendeskripsian suatu fenomena yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui studi literatur.⁶ Setelah itu, data-data yang telah ditemukana akan dianalisis dan diinterpretasikan melalui studi kasus yang diangkat, yakni terkait kebangkitan kelompok Maoist di Nepal. Pendekatan kualitatif merujuk pada pendekatan yang dilakukan dengan tujuan memahami fenomena atau gejala sosial yang diangkat dengan lebih memfokuskan pada gambaran lengkap tentang fenomena yang diangkat.⁷ Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami indikasi-indikasi apa saja yang menandakan kebangkitan kelompok Maoist di Nepal.

Hasil dan Diskusi

1. LATAR BELAKANG MUNCULNYA MAOIST

Sejarah politik sayap kiri di Nepal berawal tahun 1949 yang merupakan tahun ketika Partai Komunis Nepal (CPN) dibentuk oleh Pushpa Lal Shrestha dengan empat rekannya di Calcutta.⁸ Rencana partai ini pada dekade 1950-an yaitu reformasi tanah yang radikal, pencabutan Perjanjian 1950 dengan India dan menentang Amerika.⁹ Setelah pemisahan ideologis antara China dan Rusia di tahun 1950-an, CPN secara bersamaan memecah menjadi dua faksi dengan faksi pro-Rusia, dipimpin oleh Keshar Jung Rayamajhi, menyatakan dukungannya untuk kudeta Raja Mahendra tahun 1960. Faksi pro-China, yang dipimpin oleh Shrestha, menentang kudeta kerajaan tetapi tetap relatif tenang di kancah politik Kathmandu sampai tahun 1970-an.

Hampir sepanjang tahun 1960-an, politik Nepal kembali sedikit lebih baik dari sekadar kekuatan perjuangan antara beberapa pemimpin Bahun dan pemimpin Newar dan Raja Mahendra.¹⁰ Namun, sementara politik pada masa itu menjadi semakin

⁶ Suryana, "Metodologi Penelitian," (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), Bahan Ajar Perkuliahan.

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf

⁷ Mudjia Rahardjo "Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif," (Malang: UIN Malang, 2010) Media Informasi dan Kebijakan Kampus. <https://www.uin-malang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html>

⁸ Acharya, Avidit. "The Maoist Insurgency in Nepal and the Political Economy Of Violence." *Woodrow Wilson School of Public and International Affairs*, 2009: 5.

⁹ Ibid., hlm. 6.

¹⁰ Ibid., hlm. 7.

terkonsentrasi di pusat, seorang kader Partai Komunis muda dengan nama Mohan Bikram Singh bekerja keras mengembangkan basis aktivis sayap kiri di bukit Midwestern yang terpencil di distrik Rolpa, Rukum dan Pyuthan. Strategi Singh adalah memanfaatkan keluhan masyarakat lokal, terutama penurunan standar hidup, yang dihuni oleh para penghuni wilayahnya dilaporkan dikaitkan dengan penindasan pemerintah terhadap produksi ganja di tahun 1970-an.

Pada 1974, Singh dan anak didiknya, Nirmal Lama, mengatur pemisahan kedua dari faksi CPN pro China untuk membentuk CPN baru. Perpecahan terjadi sebagai akibatnya ketidaksepakatan antara radikal dan moderat pada apakah kesetiaan taktis dengan Kongres Nepal melawan Raja Mahendra adalah untuk kepentingan partai. Fraksi Singh dan Lama, yang mewakili kelompok yang lebih radikal, menuntut majelis konstituante bukannya restorasi demokrasi parlementer, seperti yang telah dilakukan untuk menekan Kongres.

Pada pertengahan 1980-an, faksi Singh-Lama kembali terpecah menjadi tiga kelompok kecil CPN Mashal dipimpin oleh Singh, CPN Mashal dipimpin oleh Pushpa Kamal Dahal alias Prachanda, dan lainnya yang mempertahankan nama pesta aslinya. Saat itulah Konvensi Keempat kehilangan tempatnya di garis depan politik kiri di Nepal. Sebaliknya, dalam Gerakan Rakyat 1990 terdapat koalisi tujuh partai kecil, semua berasal dari CPN asli, yang mewakili sayap kiri dalam upaya untuk menggulingkan monarki absolut. Setelah pemulihan demokrasi, koalisi ini berjalan di bawah bendera CPN (United Marxist-Leninist) dan muncul sebagai partai terbesar kedua pada tahun 1991 pemilihan umum (yang terbesar adalah Kongres Nepal). Pasukan Singh, yang telah dikesampingkan, dipersatukan kembali untuk membentuk organisasi revolusioner subversif yang dikenal sebagai *Unity Center*, dan berpartisipasi dalam pemilihan di bawah payung *United People's Front* (UPF). *Unity Center* dipimpin oleh Prachanda, sedangkan UPF diperintah oleh Nirmal Lama dan Baburam Bhattarai, pewaris warisan Singh dan pemimpin dari faksi Mashal yang.¹¹

Meskipun ada satu perpecahan akhir pada tahun 1994 ketika Nirmal Lama merebut kendali atas UPF, itu adalah Pusat Persatuan yang pertama kali mewakili komunisme pemberontak di Nepal. Karena komisi pemilihan secara resmi mengakui faksi Lama yang kurang radikal sebagai anggota UPF yang sah, faksi Prachanda-Bhattarai mengumumkan bahwa mereka tidak akan melakukannya dalam pemilihan umum tahun 1994. Kelompok militan inilah yang dikenal Partai Komunis Nepal (Maoist).

Selanjutnya, tahun 1996 menandai peluncuran Perang Sipil melawan negara Nepal. Dorongan dibalik perang adalah untuk secara fundamental mengubah hubungan historis penindasan di Nepal.¹² Sejauh mana ini adalah Perang Sipil yang bertentangan dengan pemberontakan yang memaksa rakyat masih menjadi masalah yang sangat kontroversial di Nepal dan di seluruh dunia. Namun demikian, hasilnya, pada tahun 2006 setelah sepuluh tahun sejak perang 90% daerah pedesaan telah dikendalikan oleh

¹¹ Ibid., hlm. 8

¹² Yurendra Basnett. "From Politicization of Grievances to Political Violence: An Analysis of The Maoist Movement in Nepal." *DESTIN*, 2009: 4.

Pemerintahan Rakyat yang dibentuk oleh Partai Komunis Nepal-Maoist (CPN-M). Pada tahap awal gerakan Maoist, pemerintah menyebut gerakan itu sebagai pemberontakan dan mengutuk CPN-Maoist sebagai teroris, dan bereaksi dengan kekuatan brutal untuk menekan gerakan itu.

Pada saat itu, pemerintah dan masyarakat internasional pada umumnya telah menyadari bahwa gerakan Maoist adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Saat negara tersebut memulai proses pembangunan ulang, CPN-Maoist telah memperoleh pengakuan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, salah satu tuntutan utama mereka untuk memilih majelis konstituante untuk menyusun konstitusi baru telah diterima oleh semua pemain politik utama dalam politik Nepal.¹³ Mengingat skenario saat ini, penting untuk memahami mengapa gerakan Maoist dimulai pada tahun 1996 dan meningkat sejak saat itu. Ini memiliki konsekuensi tidak hanya untuk memahami gerakan sosial yang kuat di Asia Selatan kontemporer, tetapi juga dalam menyimpulkan bagaimana inisiatif saat ini untuk pembangunan negara akan terungkap.

Pertanyaan mengapa gerakan Maoist dimulai pada tahun 1996 ketika Nepal adalah negara demokratis telah mempengaruhi sejumlah akademisi dan pembuat kebijakan, yang bekerja di Nepal atau sekitar isu-isu Nepal. Hal ini membingungkan mengingat Nepal menikmati tingkat kebebasan ekonomi dan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya selama periode ini. Penjelasan standar tampaknya tidak berbeda dari apa yang diklaim Maoist sebagai *raison d'être* mereka karena telah meluncurkan gerakan itu sejak awal.¹⁴

Berbagai pihak berpendapat bahwa ketimpangan terjadi dan dalam perwujudannya yang berbeda yaitu kemiskinan yang relatif tinggi, tidak memiliki tanah, pengangguran, dan lain-lain adalah faktor atau penyebab utama dalam kemunculan gerakan Maoist. Namun, jika seseorang melihat kembali sejarah Modern Nepal, orang akan mengamati bahwa bentuk-bentuk ketidaksetaraan atau keluhan ini ada di mana-mana, walaupun dengan tingkat intensitas yang berbeda-beda. Penjelasan sebab-akibat ini tidak banyak menjelaskan mengapa pemberontakan dimulai pada tahun 1996 dan bagaimana ketidaksetaraan ini diterjemahkan ke dalam kekerasan politik.

Dalam tulisan ini, kita bisa melihat bahwa kekerasan hadir sepanjang sejarah Nepal. Selain itu, munculnya partai CPN-Maoist pada tahun 1990 memiliki perintah politik yang berbeda yaitu dengan menggunakan kekerasan, dan strateginya untuk mempolitisasi keluhan dan mengubahnya menjadi kekuatan kolektif.

Babu Ram Bhattarai yang merupakan ideolog CPN-Maoist berpendapat bahwa kesenjangan mencolok dalam pangsa kerja dan PDB di sektor produksi primer, yaitu sektor pertanian, di seluruh desa adalah tanda pasti dari kondisi ekonomi pedesaan yang menyedihkan dan memburuk.¹⁵ Hal ini telah mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan ketidaksetaraan kemiskinan di masyarakat pada umumnya. Ini seharusnya cukup menjelaskan dasar material untuk mengobarkan pemberontakan massa petani miskin selama bertahun-tahun.

¹³ Ibid., hlm 7-8

¹⁴ Ibid., hlm. 5.

¹⁵ Ibid., hlm. 6.

Ketimpangan tampaknya menjadi penjelasan yang terlalu banyak digunakan untuk berbagai perubahan politik yang telah terjadi dalam sejarah Nepal Modern.¹⁶ Para akademisi berpendapat bahwa ketimpangan adalah penjelasan kausal utama di balik pemberontakan politik yang demokratis dalam fenomena ini.

Awal Mula Konflik

Konflik berawal dari pemberontakan partai komunis Nepal atau yang kita kenal dengan CPN-Maoist memiliki tujuan yaitu ingin meruntuhkan sistem monarki di negara Nepal dan mengubah sistem negara tersebut menjadi Negara Republik. Maoist juga menggunakan rakyat untuk memperluas pergerakan pemberontakan tersebut mendapatkan serta mengamankan kekuatan politik sudah menjadi tujuan utama kelompok ini karena mereka beranggapan bahwa untuk memenangkan perang ini dibutuhkan pergerakan politik. Maoist Nepal mengadopsi Teori Maoist yaitu menggunakan strategi 3 fase untuk memaksimalkan momentum agar mereka dapat memenangkan peperangan tersebut fase-fase tersebut adalah.

Fase 1 yaitu organisasi, konsolidasi dan penjagaan memiliki tujuan utama yaitu dalam memperkuat kekuatan politik dengan mengajak sebanyak mungkin orang untuk mengikuti gerakan tersebut.¹⁷ Dengan banyaknya orang yang mengikuti gerakan tersebut mereka mampu mengakomodir keperluan-keperluan yang mereka butuhkan untuk melancarkan gerakan tersebut seperti kebutuhan pangan, tempat, serta informasi. Mereka juga melakukan penculikan dan pembunuhan untuk melancarkan propaganda mereka. Fase 2 yaitu melakukan ekspansi bertahap tujuannya memperkuat dan mendapatkan kontrol penuh wilayah-wilayah yang mereka serang agar pada nantinya mereka mampu mengantisipasi serang-serang yang akan dilakukan pihak pemerintahan yang mampu membuat rencana mereka gagal. Fase 3 yang terakhir merupakan fase dimana pihak CPN-Maoist melakukan penyerangan dengan tujuan untuk mengambil alih Negara.

Fase 1 yaitu terjadi pada tahun 1994-2001 yaitu berawal pada tahun 1994 pihak CPN-Maoist memulai perjuangan mereka dengan mencoba mengambil kontrol pada distrik perbukitan di Rolpa dan Rukum.¹⁸ Wilayah tersebut menjadi target yang sangat strategis bagi pihak CPN-Maoist karena tempat tersebut merupakan wilayah yang memiliki pemerintahan yang buruk, korupsi, kekerasan, kasus pencurian, represi dari pihak kepolisian, infrastruktur yang buruk, serta kemiskinan yang merata, eksploitasi pekerja buruh, dan kurangnya akses edukasi. Konsolidasi yang dimaksud pada fase ini yaitu pihak Maoist menjanjikan kepada para masyarakat sipil yang menjadi penduduk di distrik Ropla dan Rukum pengembangan wilayah yang besar seperti edukasi, asuransi kesehatan, pekerjaan, listrik, menghilangkan sistem monarki, menghilangkan supresi dari pihak kepolisian dan militer, memberantas korupsi.

Setelah dua tahun melakukan perlawanan di wilayah tersebut pada akhirnya pada tahun 1996 taktik mereka berhasil dan pemberontakan tersebut meluas ke banyak wilayah

¹⁶ Ibid., hlm. 7.

¹⁷ Scott Gates dan Jason Miklian “*The Strategic Revolutionary Phases of the Maoist Insurgency in Nepal.*” Dalam buku *Insurgency in South Asia* di edit oleh Kaushik Roy, 2010 : 3

¹⁸ Ibid., hlm. 5.

lain. Di tahun 1996 juga menjadi salah satu pemicu perang saudara di Nepal karena pada saat itu pihak CPN-Maoist melakukan penyerangan di wilayah antara Rolpa dan Rukum dan Kathmadu yang dimana CPN-Maoist berhasil mengambil alih beberapa wilayah provinsi di area Barat Tengah dan Timur. Penyerangan tersebut juga memiliki alasan yaitu pihak Maoist memberikan 40 persyaratan yang harus dipenuhi agar pihak Maoist melepas wilayah yang mereka duduki pada saat itu akan tetapi pihak pemerintahan menolak. Selanjutnya salah satu strategi agar mereka berhasil menjalankan fase pertama mereka yaitu dengan mengajak para penduduk sipil mendukung pemberontakan serta bergabung dalam melakukan pemberontakan tersebut yang dimana pihak Maoist berhasil mengajak banyak masyarakat di wilayah Barat Tengah tersebut dengan memberikan mereka harapan untuk meningkatkan dan mengubah hidup mereka menjadi lebih baik dengan memberikan pengetahuan tentang kesetaraan antar masyarakat yang dimana jika kita lihat distrik yang Maoist duduki sekarang memiliki kekurangan seperti masalah kemiskinan yang menjadi senjata utama mereka dalam menarik simpati masyarakat yang ingin merasakan kesetaraan dengan masyarakat di wilayah Nepal lainnya.

Fase Kedua yaitu terjadi pada tahun 2001-2003 yang dikenal dengan Perang Maoist dimana bertujuan untuk perluasan wilayah setelah berhasil mengambil simpati masyarakat di wilayah sebelumnya. Maoist langsung melancarkan perluasan wilayah yang dimana wilayah tersebut merupakan perdesaan yang dekat dengan wilayah yang mereka sudah duduki. Pada 2001 Februari pertemuan anggota Maoist menemukan kesepakatan yang dimana mereka akan melanjutkan ekspansi wilayah dengan memberikan doktrin baru yang disebut dengan "Jalan Prachanda"¹⁹ yang dimana disini terjadi kasus pembantaian keluarga kerajaan pada tahun 2001 yang dimana pada saat itu penembakan dilakukan oleh putra mahkota Pengeran Dipendra dan selanjutnya Pangeran Dipendra dilantik menjadi raja selama 3 hari sebelum dinyatakan meninggal dan dilanjutkan oleh penggantinya yaitu Gyanendra sebagai raja yang baru akan tetapi pelantikan ini ditentang oleh penduduk Nepal yang memicu amarah penduduk memuncak karena raja Gyanendra membuat kebijakan pelarangan partai politik serta mencabut kebebasan media atas nama keamanan negara. Hal ini membuat penduduk Nepal menganggap raja tidak adil. Selanjutnya, terjadi perlawanan disaat ini pula partai Maoist melanjutkan strategi fase keduanya dengan melakukan ekspansi dan di catat hampir terjadi 100 kali peperangan di beberapa wilayah di Nepal karena kunci di fase kedua ini yaitu memperluas hampir seluruh wilayah yang akan di duduki oleh partai CPN-Maoist agar pemberontakan mereka berhasil dan tujuan mereka untuk menggulingkan sistem pemerintahan monarki di negara Nepal. Pada saat ini sudah banyak wilayah yang berhasil di kuasai oleh Maoist dengan menggunakan taktik mereka yaitu menghilangkan diskriminasi etnis serta kesetaraan sosial yang dimana pihak Maoist mendapatkan banyak dukungan dan mereka juga mendapatkan dukungan dari MJF (Forum Madhesi Janadikhar) di wilayah Terai yang dimana pemimpin mereka beranggapan bahwa kelompok pemberontak akan berhasil dalam menggulingkan sistem pemerintahan monarki yang dianggap merugikan kelompok-kelompok masyarakat miskin di beberapa daerah Nepal dukungan dari kelompok MJF juga memberikan

¹⁹ Ibid., hlm. 11.

dorongan yang kuat dalam pergerakan pemberontakan tersebut yang selanjutnya pada tahun 2004 Maoist sudah berhasil menduduk hampir seluruh wilayah di Nepal terutama wilayah yang dikenal sebagai distrik yang dipenuhi oleh masyarakat sipil miskin.

Fase ketiga atau fase terakhir terjadi pada tahun 2004-2006 setelah Maoist berhasil memiliki wilayah tepian Nepal dan wilayah terakhir yang belum bisa diduduki Maoist adalah Kathmadu yang dimana wilayah tersebut adalah wilayah utama yang dilindungi oleh tentara kerajaan Nepal yang pada awal tahun 2006 konflik antara pihak Maoist dengan tantara kerajaan Nepal mengalami titik buntu²⁰ karena pihak tentara kerjaan Nepal sangat berjuang keras agar wilayah Kathmandu tidak diduduki oleh pihak Maoist.

2. PENYELESAIAN KONFLIK

Pada 21 April 2006, raja Nepal dipaksa untuk menyerahkan tahta dan kekuasaannya terhadap negara Nepal dengan mengembalikan kekuatan dan kekuasaan kembali kepada rakyat dan selanjutnya pihak Maoist setuju untuk melakukan genjatan senjata serta menghentikan pemberontakan menggunakan senjatanya (Suryana, 2010).²¹ Kemudian, untuk penyelesaian konflik tersebut kedua pihak sepakat untuk melanjutkan proses tersebut dengan diawasi oleh PBB dan pada akhir tahun 2007 tepatnya pada tanggal 28 Desember melalui keputusan yang pada akhirnya negara Nepal mendeklarasikan perubahan sistem negara mereka yang menjadi Republik Demokratik setelah 240 tahun sistem monarki digunakan di negara Nepal.

Untuk selanjutnya terdapat juga perjanjian yang dimana pihak Maoist diharuskan melepaskan politik bersenjata mereka untuk menjadi pihak oposisi yang legal. Hal tersebut dilakukan oleh pihak Maoist karena adanya unsur ketidakpercayaan mereka terhadap koalisi tujuh partai atau yang dikenal sebagai SPA. Maka dari itu, pihak Maoist ingin menjadi oposisi yang dimana mereka ingin menciptakan keseimbangan kekuatan di negara Nepal karena tujuan Maoist adalah kesetaraan kesejahteraan masyarakat sipil di seluruh Nepal yang pada akhirnya pada 10 April 2008 terjadinya pemilihan umum pertama di negara Nepal yang dimana partai CPN-Maoist mendapatkan setidaknya 220 kursi di parlemen dari 601 dan pada agustus 15 Agustus 2008 pemimpin Maoist Puspha Kamal Dahal atau yang dikenal dengan Prachanda terpilih menjadi Perdana Menteri Nepal yang didukung oleh banyak masyarakat sipil.²² Kemudian, kemenangan Maoist dalam pemilihan umum dipertanyakan apakah tujuan awal untuk mensejahterakan masyarakat sipil di seluruh wilayah Nepal dapat tercapai melalui kebijakan yang diterapkan pasca konflik.

²⁰ Ibid., hlm. 17.

²¹ Gyan Pradhan. "Nepal's Civil War and Its Economic Cost" Journal of International and Global Studies (2009):118<https://www.lindenwood.edu/files/resources/114-131.pdf>

²² Ibid., hlm .119

3. PASCA KONFLIK

Konflik yang melibatkan kaum pemberontak CPN-Maoist dan pemerintah negara Nepal resmi berakhir pada 20 November 2006 melalui sebuah perjanjian perdamaian. Adapun isi dari perjanjian damai tersebut ialah untuk membawa para pemberontak yang mengendalikan konflik dari desa dampai ke arus politik. Hal ini kemudian membawa CPN-Maoist mendapatkan kedudukan politik dalam tatanan pemerintahan di Nepal. Pemerintah Nepal berharap, Maoist yang dahulu berfungsi sebagai partai politik yang memperjuangkan kepentingan melalui gencatan senjata bertransformasi menjadi partai politik yang akan bermain dengan aturan demokrasi parlementer.²³ Transformasi ini resmi dimulai ketika Maoist membuat ketgori komitmen terhadap sistem multipartai dan politik damai yang dituangkan dalam pemahaman 12 poin pada November 2005.²⁴

Meskipun telah menandatangani perjanjian damai pada tahun 2006 kemudian tidak membuat konflik yang sebelumnya berhenti begitu saja melainkan masih terdapat gerakan senjata. Duta Besar AS untuk Nepal pada awal tahun 2007 mengatakan bahwa pemerintah AS tidak akan menghapus label teroris pada Maoist Nepal karena Maoist belum membuktikan bahwa mereka telah menghentikan kekerasan. Kemudian di tahun yang sama ketua Maoist Prachanda mengatakan bahwa partainya akan melakukan protes ke jalanan jika pemerintah gagal mengeluarkan konstitusi dalam delapan hari ke depan yang membuka jalan bagi Maoist untuk bergabung ke dalam kabinet sementara pemerintahan Nepal. Pada 8 Januari 2007 atau 3 hari setelah Prachanda memberi ancaman akan melakukan protes kembali, para pemimpin penting dari aliansi tujuh partai yang berkuasa di Nepal sepakat mengumumkan konstitusi sementara dan hal ini secara resmi membuka jalan bagi Maoist masuk dan bergabung dalam arus politik di pemerintahan Nepal.²⁵

Salah satu aksi kekerasan yang dilakukan oleh Maoist setelah menyatakan damai ialah fenomena dimana Maoist melakukan penutupan pada kantor proyek pembangkit listrik akibat kantor tersebut menolak membayar 25% dari total laba proyek kepada Maoist. Dapat disimpulkan bahwa Maoist tetap melakukan pemberontakan meskipun tidak seperti sebelumnya sampai kepentingan mereka terpenuhi. Maoist juga melakukan pembubaran semua pemerintahan rakyat Nepal, pengadilan rakyat dan komune di seluruh negeri. Insiden penembakan kepada seorang aktivis Forum Madhesi Janaadhikar distrik Siraha oleh Maois dalam sebuah pemberontakan kemudian membawa James F Moriarty seorang Dubes AS untuk Nepal menentang bahwa Maoist tidak boleh dilantik di kabinet sementara sebelum proses manajemen senjata diselesaikan secara tuntas.

Memasuki tahun 2008 awal, Nepal dikejutkan dengan ledakan bom di tiga tempat berbeda di kota Birhunj. Menurut polisi setepat ledakan ini terjadi akibat ulah dari Janatantrik Terai Mukti Morcha (JTMM-J) yang merupakan organisasi terorisme yang

²³ Tilak P Pokharel dan Somini Sengupta "Maoists Sign Peace Deal in Nepal", New York Times, 22 November 2006

²⁴ Krishna Hachhethu, "The Communist Party of Nepal (Maoist): *Transformation from an Insurgency Group to a Competitive Political Party*", EBHR 33-34

²⁵ Nepal Timelien Year 2007", www.satp.org, diakses pada 6 Mei 2020, <https://www.satp.org/satporgtp/countries/nepal/timeline/2007.htm>

berasal dari pecahan partai Maoist. JTMM-J melakukan aksi protes akibat sebagian Maoist yang tergabung dalam organisasi ini merasa bahwa CPN-Maoist sudah tidak sepaham dan CPN-Maois tidak menjamin otonomi dari wilayah. Tidak hanya itu, JTMM-J juga melakukan penembakan kepada seorang wartawan.²⁶ Perjuangan CPN-Maoist dalam memasuki parlemen tidak hanya berkonflik dengan pecahan dari partai sendiri melainkan mendapat tentangan oleh Kongres. Protes yang dilayangkan oleh Kongres Nepal dalam permohonan kepada pemerintah untuk tidak memperbolehkan CPN-Maoist masuk ke ranah pemerintahan sementara, kecuali mereka sepenuhnya melepaskan segala bentuk kekerasan.

CPN-Maoist mengikuti pemilihan umum parlemen seperti partai politik lain di Nepal yang diadakan pada 2008. Hasil dari pemilihan umum tersebut menyatakan bahwa CPN-Maoist memenangkan kursi terbanyak di parlemen. Mengikuti dengan kemenangan CPN-Maoist, Nepal yang pada awalnya negara monarki mendeklarasikan diri sebagai negara republik. Pada Juli 2008 Prachanda terpilih menjadi Perdana Menteri pemerintahan yang baru. Kekuatan dan hubungan yang kuat antara CPN-Maoist dengan militer menghantarkan CPN-Maoist mencapai kepentingan yang selama ini mereka perjuangkan.²⁷ Memasuki tahun 2009, CPN-Maoist bergabung dengan Partai Komunis Nepal (Unity Center-Masal) untuk menjadi *Unified Communist Party of Nepal* (UCPN). Bulan Mei pada tahun yang sama, Prachanda mengundurkan diri dari jabatannya setelah ia mencoba dan kemudian gagal dalam menghapus kepala angkatan bersenjata Nepal. Meskipun Prachanda sudah mengundurkan diri tetapi UCPN tetap menjadi bagian dari pemerintahan dan merupakan pemain utama dalam pemerintahan. Kemudian pada November 2011 terbentuk sebuah perjanjian hasil UCPN dimana mengintegrasikan mantan pejuang pemberontak angkatan bersenjata Nepal.

Konflik yang terjadi lebih satu dekade ini menjadi faktor utama dari transisi-restruktisasi negara Nepal dengan penghapusan pemerintahan monarki dan pembentukan republik serta manajemen senjata dan penciptaan demokrasi yang inklusif. Terdapat satu bagian terpenting dari semua keputusan dan perjanjian bilateral yang telah terjadi yakni periode yang berkaitan dengan transformasi konflik berlatarbelakang satu dekade perang panjang antara kaum pemberontak dibawah naungan CPN-Maoist dan pasukan keamanan negara mengambil keputusan untuk memastikan transformasi dari kelompok pemberontak bersenjata ke partai politik kompetitif. Transformasi Maoist mirip dengan transformasi partai-partai politik liberal dunia ketiga dan seluruh partai komunis di dunia. Namun terdapat sedikit perbedaan yang terjadi pada Maoist dimana keberadaan partai ini di panggung politik Nepal dipandang unik dan penganut partai ini di Nepal tidak pernah berkurang. Di banyak negara berkembang, partai komunis yang dulunya paling kuat berubah menjadi lemah tetapi untuk Maoist meskipun sepenuhnya mengabaikan kebijakan dengan merebut kekuasaan negara melalui pemberontakan namun Maoist muncul sebagai salah satu kekuatan paling kuat yang penting bagi masa depan Nepal.

²⁶ Loc. cit.

²⁷ “*Communist Party of Nepal (Maoist Centre)*”, Britannica, <https://www.britannica.com/topic/Communist-Party-of-Nepal-Maoist-Centre>

4. INDIKASI KEBANGKITAN MAOIST

Berbagai peristiwa yang telah terjadi dari awal mula konflik sampai pasca konflik tersebut telah membuat sebuah kekhawatiran mengenai gerakan pemberontak yang dikenal dengan Maoist ini akan kembali beraksi atau sudah berhenti dan mencapai keinginannya sehingga tidak membuat pergerakan lagi? Maka dari itu dalam pembahasan artikel ilmiah ini juga, penulis berusaha memberikan indikasi-indikasi akan gerak-gerik yang telah diluncurkan oleh partai Maoist itu sendiri. Indikasi pertama adalah sejak perjanjian perdamaian yang telah ditandatangani pada tahun 2006, muncul sebuah diskusi yang berlarut-larut untuk menyelesaikan perselisihan tentang proses reintegrasi mantan kombatan. Dimana diwarnai oleh solusi untuk menyetujui tiga opsi yang diberikan yaitu untuk memfasilitasi dan proses reintegrasi - integrasi dan bergabung sebagai Angkatan Darat Nepal, solusi selanjutnya adalah diberikannya pensiun sukarela berbantuan tunai dan solusi terakhir adalah rehabilitasi melalui memperoleh keterampilan alternatif. Mungkin terdengar tidak berbahaya ataupun mengindikasikan sebuah masalah, namun siapa yang menyangka bahwa solusi tersebut mengeluarkan sebuah resiko yang lebih jauh berbahaya. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Kul Chandra Gautam dalam karya ilmiahnya yang berjudul “*Global Citizen from Gulmi: My Journey From the Hills of Nepal to the Halls of United Nations*” menyebutkan kebanyakan mantan gerilyawan ataupun pemberontak akhirnya memilih opsi pensiun sukarela daripada bergabung dengan anggota militer Angkatan Darat Nepal, yang pada dasarnya merupakan pembayaran tunai. Pendekatan ini memang berpusat pada memungkinkan reintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat yang sejahtera dengan menyediakan modal, atau bantalan ekonomi. Namun, proses kurang disukai oleh donor internasional yang merasa tidak senang dengan memberikan sejumlah uang tunai atau hibah kepada mantan pemberontakan.²⁸

Indikasi kedua yakni memasuki pada tahun 2007 dimana setelah penundaan pertama pemilihan CA oleh Komisi Pemilihan yaitu pertemuan Komite Sentral di Kathmandu, Maoist telah memutuskan untuk meluncurkan gerakan pemberontakan jalanan untuk menuntut pembentukan republik di Legislatif Sementara. Pada bulan Mei, para pemimpin Maoist menegaskan kembali ancaman mereka untuk meluncurkan Gerakan Tiga S yaitu di Sarak (jalan-jalan), di Sarkar (pemerintah) dan di Samsad (Parlemen). Deklarasi ini segera ditanggapi oleh pemerintah dengan negosiasi yang intens antara CPN-Maoist dan pemerintah dengan tujuan untuk mencoba menghentikan gerakan Maoist. Tidak lama kemudian lebih tepatnya dua hari sebelum batas waktu ditetapkan untuk berakhir, situasi di wilayah Tarai memburuk ketika terjadinya pembantaian lain di Distrik Kapilbastu. Pembantaian tersebut di susul oleh pembunuhan seorang pemimpin lokal oleh kelompok yang tidak dikenal menyebabkan kerusakan pecah di desa-desa dekat perbatasan India. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selama insiden ini setidaknya 22 orang terbunuh oleh kelompok-kelompok Madhesi, 119 rumah dibakar dan lebih dari 5.000 orang

²⁸ Kul Chandra Gautam. “*Global Citizen from Gulmi : My Journey From the Hills of Nepal to the Halls of United Nations*”. 2008

mengungsi. Sebagian besar korban adalah Pahadis.²⁹ Maoist mengecam insiden ini sebagai konspirasi kerajaan dan dapat penulis simpulkan bahwa disini kelompok Maoist seperti dijebak dan dituduh atas tindakan penyerangan tersebut yang telah membuat amarah kelompok maoist terpancing dan semakin membara.

Indikasi ketiga yang penulis ditemukan adalah sejak bergabungnya partai Maoist dengan proses perdamaian pada 2006 yang akan menghubungkan kepada tahun 2013, kelompok Maoist ternyata telah berpisah lebih dari empat kali. Salah satu cabang adalah Partai Komunis Nepal yang dipimpin Chand, yang mengklaim sebagai partai Maoist asli. Chand dan para pemimpin lainnya setuju untuk menentang bergandengan tangan dengan partai-partai parlemen lain pada tahun 2006 untuk menandatangani Perjanjian Perdamaian Komprehensif (CPA). Chand, yang kini menjadi pemimpin partai Maoist radikal dan sekarang telah muncul sebagai tantangan bagi pemerintah yang dipimpin oleh Ketua NCP K.P. Sharma Oli dan untuk Prachanda sendiri. Partainya telah melakukan tindakan memboikot pada pemilihan Majelis Konstituante (CA) kedua yang diadakan pada tahun 2013 dan pemilihan ketiga tingkat yang diadakan pada tahun 2017. Partai yang dipimpin oleh Chand ini juga menentang konstitusi 2015 dimana Chand mengatakan bahwa Prachanda meninggalkan agenda utama gerakan Maoist dan Chand mengklaim tujuannya adalah untuk memenuhi agenda yang tersisa dari revolusi Maoist.³⁰

Hanya memakan satu tahun saja tepatnya di tahun 2014 silam, kelompok sempalan Maoist telah muncul sebagai tantangan keamanan bagi Nepal. Dalam beberapa bulan terakhir pada tahun 2014, partai Chand telah meningkatkan kehadiran dan aktivitas kekerasannya di beberapa bagian negara itu, terutama di daerah paling barat dan pertengahan barat, yang merupakan jantung dari gerakan Maois. Terdapat laporan di media lokal bahwa partai Maoist ini telah mengumpulkan sumbangan dari pengusaha, baik secara sukarela atau melalui pemerasan. Partai Maois ini pun dengan mengejutkan dalam waktu yang bisa dikatakan cukup singkat telah membentuk sebuah pasukan paramiliter, yang belum diumumkan kepada publik. Pada tanggal 7 Maret 2019 telah dilakukannya, penggerebekan kampung halaman Chand, yang terletak di distrik Kapilbastu, dan menyita senjata dan amunisi. Menurut laporan media setempat, pasukan keamanan menyita dua senapan mesin ringan, 68 peluru, dan tiga majalah.³¹ Beberapa kader Maoist telah ditangkap dengan senjata milik Angkatan Darat Nepal selama periode pemberontakan. Selama pemberontakan, Maoist telah menangkap senjata dari Angkatan Darat Nepal. Tampaknya kelompok itu tidak menyerahkan semua senjatanya selama proses integrasi - setidaknya beberapa senjata disimpan oleh para pemimpin dan kader di dekat Chand.³²

²⁹ Kiyoko Ogura. "Seeking State power : The Communist Party of Nepal (Maoist)". 2008 : 41

³⁰ Kamal Dev Bhattarai, "Are the Maoists Rising Again in Nepal? 13 years after the civil war ended, a splinter Maoist group is waging a new campaign of violence," The Diplomat, 13 Maret 2019

³¹ Anud Ojha. "Kathmandu Metropolis Allocates Rs500 Million to Instal 6,000 Street Lamps". The Kathmandu Post, 10 Maret 2019

³² Kamal Dev Bhattarai, Op. Cit.

Indikasi selanjutnya yang mengejutkan dunia akan gerakan maoist ini melakukan penyerangan yang dilakukan pada 22 Februari 2015, dinyatakan satu orang tewas dan dua lainnya terluka parah ketika sebuah bom meledak di pintu masuk kantor Ncell, yang terletak di ibu kota Nepal, Kathmandu. Pada hari yang sama, telah ditemukannya bom yang ditanam dengan sasaran lebih dari selusin menara Ncell, yaitu sebuah perusahaan telekomunikasi multinasional. Dua hari setelah penyerangan tersebut, Netra Bikram Chand menelepon koresponden dari outlet media utama untuk mengambil tanggung jawab atas ledakan itu dengan alasan melakukan penyerangan tersebut adalah untuk menghukum perusahaan karena tidak membayar pajak kepada pemerintah Nepal. Partai Maoist juga mengatakan bahwa mereka tidak berniat menyerang masyarakat umum dan meminta maaf atas kematian seorang warga sipil. Tentu ini menjadi sebuah argumen bagi penulis untuk menyatakan bahwa akankah indikasi-indikasi yang telah terjadi ini akan membawa kepada peristiwa kebangkitannya gerakan maoist di Nepal atau sebaliknya, gerakan partai Maois ini akan melakukan penegakan hukum dengan hukumnya sendiri di Nepal.

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa Gerakan yang dilakukan oleh kelompok Maoist sedikit banyak telah dipengaruhi oleh negara-negara yang menjalin hubungan dekat dengan Nepal. Pada awalnya, negara Nepal merupakan negara yang menganut system monarki absolut hingga pada akhirnya mengalami pergeseran menjadi monarki konstitusional. Pada tahun 1966, keadaan Nepal yang tidak stabil mengakibatkan berbagai tuntutan massa yang menginginkan perubahan di negara Nepal dan hal inilah yang menjadi awal mula Gerakan Maoist di Nepal dilakukan.

Awal mula konflik di Nepal terjadi melalui tiga fase. Fase pertama, yaitu organisasi, konsolidasi dan penjagaan. Fase kedua, yaitu melakukan ekspansi bertahap dan fase ketiga merupakan fase dimana pihak CPN-Maoist melakukan penyerangan dengan tujuan untuk mengambil alih negara. Penyelesaian konflik tersebut akhirnya tercapai pada akhir tahun 2007 yang dilakukan dengan pengawasan oleh PBB dimana akhirnya negara Nepal melakukan perubahan system negara menjadi Republik Demokratik. Namun, perjanjian damai tersebut ternyata tidak serta merta meniadakan konflik yang pernah terjadi. Di tahun-tahun berikutnya, terjadi sejumlah gerakan yang mengindikasikan kebangkitan Maoist. Hal ini dapat terjadi karena adanya perpecahan baru dari tubuh Maoist yang lama sehingga masih mengisyaratkan masih adanya gerakan Maoist di Nepal yang menjadi pihak oposisi negara. Gerakan senjata tersebut membuat pihak Amerika Serikat memberi label pada Maoist sebagai kelompok teroris akibat kegiatannya yang merugikan negara.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa kelompok Maoist masih menjalankan misinya di Nepal. Hal tersebut dapat dilihat melalui indikasi-indikasi kebangkitan kelompok Maoist. Maka dari itu, langkah baiknya jika penelitian selanjutnya dapat memaparkan berbagai fenomena yang terjadi di Nepal akibat gerakan kelompok Maoist serta keadaan sosial politik terkini negara tersebut.

Referensi

Jurnal:

- Acharya, A. (2009). *The Maoist Insurgency in Nepal and the Political Economy Of Violence*. *Woodrow Wilson School of Public and International Affairs*, 5-8.
- Basnett, Y. (2009). From Politicization of Grievances to Political Violence: An Analysis of The Maoist Movement in Nepal. *DESTIN*, 4-7.
- Gates, S., & Miklian, J. (2010). *The Strategic Revolutionary Phases of the Maoist Insurgency in Nepal*. In K. Roy, *Insurgency in South Asia* (p. 3-17).
- Gautam, K. C. (2008). "Global Citizen from Gulmi : My Journey From the Hills of Nepal to the Halls of United Nations".
- Hachhethu, K. (n.d.). *The Communist Party of Nepal (Maoist) : Transformation an Insurgency Group to a Competitive Political Party*. *EBHR*, 33-34.
- Ogura, K. (2019). *Seeking State Power : The Communist Party of Nepal (Maoist)*. *Berghof Research Center for Constructive Conflict Management*.
- Pokharel, T. P., & Sengupta, S. (2006). *Maoist Sign Peace Deal in Nepal*. New York Times.
- Pradhan, G. (2009). *Nepal's Civil War and Its Economic Cost*. *Journal of International and Global Studies*, 118-119.
- Rahardjo, M. (2010). Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif. *Media Informasi dan Kebijakan Kampus*.
- Sugiarto, P., & Purwono, A. (2010). Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional: Gagasan dan Posisi Teoritik. *SPEKTRUM*, 14-15.
- Suryana. (2010). Metodologi Penelitian. *Universitas Pendidikan Indonesia*.

Skripsi:

- A'unillah, M. Fairuz. (2010). Proses Pergantian Sistem Politik dan Pemerintahan di Nepal: Perubahan Sistem Pemerintahan Nepal. *Repository UMY*
- Prasetya, O. S. (2017). Keputusan Nepal Menjadikan Cina Sebagai Investor Utama Menggantikan India: Perkembangan Politik di Nepal. *Repository UNEJ*.

Website:

- Bhattarai, K. D. (2019). *Are the Maoists Rising Again in Nepal? 13 years after the civil war ended, a splinter Maoist group is waging a new campaign of violence.*. The Diplomat.
- Gupta, D. (n.d.). *Communist Party of Nepal (Maoist Centre)*. Britannica .
Nepal Timelien Year . (n.d.). Retrieved from
<https://www.satp.org/satporgtp/countries/nepal/timeline/2007.htm>
- Ohja, A. (2019). *Kathamandu Metropolis Allocates Rs500 Million to Instal 6,000 Street Lamps*. The Katmandu Post.